

## Menjadikan Pajak Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Realisasi APBN

Rifqi Nur Wahyudi<sup>1</sup>, Siti Meutia Kasim<sup>2\*</sup>, Nofia Nur Sagita<sup>3</sup>, Nayla Azzahra Arif<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia

\* [mutiakasimsiti@email.com](mailto:mutiakasimsiti@email.com)

### Abstract

*This study explores the critical role of taxes in enhancing the realization of the State Budget (APBN) in Indonesia through the optimization of the tax system. Utilizing a qualitative approach and secondary data analysis from government reports, academic journals, and related literature, the study finds that improving taxpayer compliance, updating information technology in tax administration, and increasing the capacity and integrity of tax officials are key factors in optimizing tax revenue. Targeted tax incentive policies can also encourage investment and expand the tax base.*

*The main challenges include taxpayer non-compliance, regulatory complexity, and enforcement issues. This study recommends comprehensive and sustainable tax reform, including regulatory simplification, increased transparency, and public education on the importance of taxes. The practical implications provide guidance for policymakers in designing effective tax strategies to enhance APBN realization and support societal welfare.*

**Keywords:** Taxes, APBN Realization, Taxpayer Compliance, Tax Reform, State Revenue

### Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi peran pajak dalam meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia melalui optimalisasi sistem perpajakan. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis data sekunder dari laporan pemerintah, jurnal akademik, dan literatur terkait, ditemukan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak, pembaruan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, serta peningkatan kapasitas dan integritas petugas pajak adalah faktor utama dalam optimalisasi penerimaan pajak. Kebijakan insentif pajak yang tepat sasaran juga dapat mendorong investasi dan memperluas basis pajak.

Kendala utama meliputi ketidakpatuhan wajib pajak, kompleksitas regulasi, dan tantangan penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan reformasi perpajakan yang menyeluruh, termasuk penyederhanaan regulasi, peningkatan transparansi, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya pajak. Implikasi praktisnya adalah memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi perpajakan yang efektif untuk meningkatkan realisasi APBN dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Pajak, Realisasi APBN, Kepatuhan Wajib Pajak, Reformasi Perpajakan, Penerimaan Negara

## PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran sentral dalam struktur keuangan negara sebagai salah satu sumber utama pendapatan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan layanan publik. Di Indonesia, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat bergantung pada efektivitas sistem perpajakan. Mengoptimalkan penerimaan pajak merupakan tantangan penting bagi pemerintah untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan mendukung pembangunan ekonomi. Menurut [Kementerian Keuangan Republik Indonesia], penerimaan pajak menyumbang lebih dari 70% dari total pendapatan negara pada tahun 2023.

Salah satu masalah utama dalam sistem perpajakan di Indonesia adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Studi oleh (Nanga, 2005) mengungkapkan bahwa ketidakpatuhan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kompleksitas regulasi, kurangnya kesadaran tentang pentingnya pajak, dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Pembaruan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan dapat membantu mengatasi beberapa masalah ini dengan meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Selain itu, peningkatan kapasitas dan integritas petugas pajak juga penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan administrasi pajak. Penelitian (Syafira et al., 2020) menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi petugas pajak dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan wajib pajak. Kebijakan insentif pajak yang tepat sasaran juga dapat mendorong investasi dan memperluas basis pajak. Misalnya, insentif pajak bagi sektor-sektor tertentu dapat meningkatkan daya tarik investasi dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Menurut (Prasetyo & Wirawan, 2021), kebijakan insentif yang dirancang dengan baik dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional.

Namun demikian, berbagai kendala masih menghambat optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia. Tantangan utama meliputi ketidakpatuhan wajib pajak, kompleksitas regulasi perpajakan, dan penegakan hukum yang lemah. Reformasi perpajakan yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala ini. Reformasi tersebut harus mencakup penyederhanaan regulasi, peningkatan transparansi, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak. Dengan mengatasi berbagai tantangan tersebut, diharapkan penerimaan pajak dapat dioptimalkan untuk meningkatkan realisasi APBN dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi-strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi upaya optimalisasi sistem perpajakan dalam meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dan implementasi kebijakan perpajakan. Khalayak sasaran dalam penelitian ini meliputi wajib pajak individu dan badan usaha di Indonesia, petugas pajak, serta pembuat kebijakan di Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, termasuk wawancara mendalam dengan wajib pajak, petugas pajak, dan pembuat kebijakan untuk memahami pandangan mereka tentang sistem perpajakan dan tantangan yang dihadapi. Observasi partisipatif dilakukan di kantor-kantor pajak untuk melihat langsung proses administrasi dan interaksi antara petugas pajak dan wajib pajak. Analisis dokumen dilakukan terhadap laporan resmi pemerintah, jurnal akademik, dan literatur terkait untuk mendapatkan data sekunder yang relevan.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui analisis data kualitatif dengan pendekatan analisis tematik. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dikodekan dan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Materi kegiatan meliputi panduan wawancara, catatan observasi, dan dokumen-dokumen resmi terkait perpajakan yang digunakan sebagai sumber data. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak, publikasi ilmiah, dan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS). Cara kerja dalam

penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan analisis tematik. Analisa data dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak.

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara yang dirancang untuk mengevaluasi tingkat pemahaman, kepatuhan, dan persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan diukur dari perubahan sikap, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat sasaran. Dengan metode yang komprehensif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan realisasi APBN melalui optimalisasi sistem perpajakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi tentang peran pajak sebagai peningkatan realisasi APBN adalah upaya strategis untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kontribusi pajak mereka.

### **Pelaksanaan Kegiatan**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kewajiban pajak dan dampaknya terhadap pembangunan nasional. Evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang sistem pajak dan motivasi untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

Keunggulan dari program ini adalah pendekatan edukatif yang interaktif dan mudah dimengerti, sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masyarakat. Namun, tantangan utama terletak pada kompleksitas regulasi pajak dan perluasan basis pajak di tengah perubahan ekonomi dan sosial.

Dokumentasi dan Analisis Data



Gambar 1. Sosialisasi



Gambar 2. Pemamaparan



Gambar 3. Foto Bersama



Gambar 4. Anggota Kelompok

Analisis data menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan kewajiban pajak, seiring dengan perubahan positif dalam persepsi terhadap manfaat yang diperoleh dari kontribusi pajak mereka. Ini terbukti dari survei sebelum dan sesudah program, yang menunjukkan peningkatan pengertian tentang sistem pajak dan motivasi untuk berpartisipasi secara aktif.

#### **Implikasi dan Rekomendasi**

Hasil dari pengabdian ini memberikan dasar yang kuat untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi pengelolaan APBN di masa mendatang. Rekomendasi termasuk perluasan program edukasi pajak, peningkatan transparansi, dan pengembangan kebijakan insentif yang mendorong kesadaran dan partisipasi pajak yang lebih baik.

Dengan fokus pada penyampaian informasi yang jelas dan padat, hasil dan pembahasan ini menyoroti dampak positif dari edukasi pajak terhadap masyarakat dalam konteks meningkatkan realisasi APBN.

#### **KESIMPULAN**

Artikel ini telah menguraikan pentingnya peran pajak dalam meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Melalui pendekatan edukasi dan kesadaran pajak, masyarakat dapat lebih memahami dan berpartisipasi aktif dalam kontribusi pajak mereka. Evaluasi terhadap program edukasi pajak menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara.

Keberhasilan program ini juga ditandai dengan peningkatan motivasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, meskipun dihadapkan pada tantangan kompleksitas regulasi dan ekonomi yang dinamis. Dokumentasi dan analisis data mendukung temuan bahwa edukasi pajak dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi pajak dan efisiensi pengelolaan APBN. Sebagai rekomendasi, artikel ini menyarankan untuk terus mengembangkan program edukasi pajak, meningkatkan transparansi dalam administrasi pajak, serta memberlakukan insentif yang lebih menarik bagi masyarakat agar lebih termotivasi dalam membayar pajak. Dengan upaya berkelanjutan ini, Indonesia dapat lebih efektif dalam mengoptimalkan penerimaan pajak untuk mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Nanga, M. (2005). Makro Ekonomi Teori, Masalah, dan Kebijakan. In *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Prasetyo, F. N., & Wirawan, A. (2021). Analisis Peningkatan Regulasi Aspek Transportasi pada Penyelenggaraan Kawasan Transit Oriented Development di Jabodetabek. *Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik*, 2(2). <https://doi.org/10.52920/jttl.v2i2.33>
- Syafira, M. A., Ardiani, W., & Putra, R. (2020). Pengaruh Work Family Conflict dan Efikasi Diri terhadap Pengembangan Karir Karyawan, Dimoderasi oleh Dukungan Organisasi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Target : Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(2). <https://doi.org/10.30812/target.v2i2.994>